

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM  
MELAKUKAN RESES DI DAERAH PEMILIHAN 3  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**REZA FIRMANSYAH**  
**NIM. 11840311733**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Reza Firmansyah  
NIM : 11840311733  
Judul : Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Melakukan Reses di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 09 September 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 September 2022

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Toni Hartono, S.Ag., M.Si  
NIP. 19780605 200701 1 024

Sekretaris/ Penguji II,

Muhammad, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III,

Artis, S.Ag., M.I.Kom  
NIP. 19680607 200701 1 047

Penguji IV,

Rohayati, S.Sos., M.I.Kom  
NIP. 19880801 202012 2 018

## Halaman Persetujuan Pembimbing

### Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Melakukan Reses di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Disusun Oleh:



Reza Firmansyah

NIM:11840311733

Pembimbing



Sudianto. S.Sos.,M.I.Kom

NIP:198012302006041001

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Badri, M.Si

NIP:198103132011011004

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reza Firmansyah  
 NIM : 11840311733  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Alang Lawas, 20 Juni 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi  
 Prodi : Ilmu Komunikasi  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Melakukan Reses Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 september 2022  
 Yang membuat pernyataan



Reza Firmansyah  
 NIM : 11840311733

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Reza Firmansyah  
NIM : 11840311733  
Judul : STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM MELAKUKAN RESES DI DAERAH PEMILIHAN III DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Februari 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Februari 2022

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

Penguji II,

**Rafdeadi, M.A**  
NIP. 19821225 201101 1 011

**Tika Mutia, M.I.Kom**  
NIP. 19861006 201903 2 010

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 23 Agustus 2022

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 di-  
 Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*  
 Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Reza Firmansyah  
 NIM : 11840311733  
 Judul Skripsi : STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD  
 DALAM MELAKUKAN RESES DI DAERAH PEMILIHAN 3  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI  
 SUMATERA BARAT

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

Sudianto S.Sos, M.I.Kom  
 NIP.198012302006041001

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.  
 NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama :Reza Firmansyah**

**Prodi :Ilmu Komunikasi**

**Judul :Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Melakukan Reses Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat**

Skripsi ini berjudul Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Melakukan Reses Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah penelitian ini yang pertama, Bagaimana program anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memanfaatkan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) III. Kedua, Bagaimana anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mendeskripsikan program kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di dapil III. Kedua, untuk mendeskripsikan komunikasi politik anggota DPRD dalam kegiatan reses di dapil III. Teori yang digunakan adalah Teori Empati dan Homofili dalam kegiatan reses dengan yang mana pendekatan ini melihat komunikasi politik sebagai suatu sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada berbagai arus informasi, pemerintah sebagai komunikator dari arus informasi tersebut. Hasil temuan penelitian ini adalah **Pertama**, program dapil III dalam kegiatan reses ini ada dua yang pertama reses yang kedua Jaringan Aspirasi Masyarakat (jasma) sebagai bentuk komunikasi anggota dewan dengan masyarakat. **Kedua**, anggota dewan memaksimalkan kegiatan reses ini berbeda-beda dalam konteks bentuk komunikasinya dengan masyarakat. Meski terdapat beberapa kendala dalam kegiatan reses tersebut anggota dewan memiliki cara setiap individu dalam memaksimalkan kegiatan reses yang dilaksanakan setiap satu tahun tiga kali tersebut. **Ketiga**, anggota DPR juga memanfaatkan penggunaan media massa seperti platform Facebook untuk menyampaikan kegiatan Reses mereka dan membangun Personal Branding yang baik melalui postingan-posting kegiatan mereka.

**Keyword: Komunikasi politik, Anggota Dewan (DPRD), Reses.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***Political Communication Strategy of DPRD Members in Conducting Recesses in Electoral Districts of 3 Districts of Fifty Cities West Sumatra Province.***

*This thesis is entitled Political Communication Strategy of DPRD Members in Conducting Recesses in Electoral Districts of 3 Districts of Fifty Cities West Sumatra Province. . Second, how the members of the Fifty Cities Regency DPRD make recess activities as a medium of political communication. The purpose of this study, firstly, is to describe the program of recess activities for members of the Fifty-City DPRD in Dapil III. Second, to describe the political communication of DPRD members in recess activities in electoral districts III. The theory used is the theory of political communication in recess activities with the harrol d lasswell approach where this approach sees political communication as a decision-making system based on various information flows, the government as a communicator of the information flow. The findings of this study are **first**, the district III program in this recess activity has two, the first is a recess and the second is social services as a form of communication between council members and the community. **Second**, the members of the council maximize these recess activities in different ways in the context of their form of communication with the community. although there are several obstacles in the recess activities, the council members have their own way of maximizing the recess activities which are held three times a year. **Third**, DPR members also take advantage of the use of mass media such as the Facebook platform to convey their Recess activities and build good personal branding through postings of their activities.*

**Keyword:***political communications,DPRD members,recesses*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaihi Syaiddina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program SI Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Melakukan Reses Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

1. Orangtua penulis yang tercinta, Bapak Raharjo dan Ibu Nurmaiya, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Prof. Dr.Hairunas M.A.g, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr.Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor 2 dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D sebagai Wakil Rektor 3

3. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu dan Bapak pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi

4. Bapak Dr. Muhammad Badri M, Si selaku ketua jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom sebagai Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Sudianto S.Sos, M.I.Kom sebagai Dosen Pembimbing. Terima Kasih atas dukugan dan bimbingan yang diberikan pada penulis dari awal sampai akhir.

6. Bapak Rafdeadi, S.Sos.I, MA, sebagai penasehat akademis yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran kepada penulis dari awal mulai perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak, Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dan Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Kepada Bapak Amirunnas S.Sos selaku Pamong selama magang di DPRD KAB.50 kota yang telah membimbing Penulis dengan baik

9. Kepada para Anggota Dewan dapil III yang telah bersedia diwawancara guna melengkapi skripsi penulis .

10. Kepada teman-teman penulis yang juga telah memberi semangat kepada penulis.

11. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru,5 Juni 2022  
Penulis

**Reza Firmansyah**  
**NIM:11840311733**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan istilah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	14
2.3 Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Sumber Data Penelitian .....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota .....	39
4.2 Sejarah dan kondisi geografis lokasi penelitian .....	41
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
5.1 Program anggota DPRD Kabupaten lima Puluh Kota dalam memanfaatkan kegiatan reses di Dapil III.....	46
5.2 Strategi Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik.....	52
5.3 Faktor pendukung strategi komunikasi politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat melaksanakan Reses .....	60
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1 Kesimpulan .....	63
6.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 batas wilayah kab.lima puluh kota .....	41
Tabel 1 Daerah Pemilihan 1 .....	44
Tabel 2 Daerah Pemilihan 2 .....	45
Tabel 3 Daerah Pemilihan 3 .....	45
Tabel 4 Daerah Pemilihan 4 .....	45
Tabel 5 daerah pemilihan 5.....	45
Tabel 5.1 Nama-nama Anggota DPRD Dapil III .....	47
Tabel 5.2 Perbedaan Reses dan Jasma .....	49
Tabel 5.3 Rincian Anggaran Reses per Anggota di DPRD Lima Puluh Kota .....	51

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik. Atau secara sederhana dapat disebutkan bahwa komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bermuatan politik dari suatu sumber kepada penerima untuk menciptakan pemahaman makna bersama.

Dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Bambang Setiawan berpendapat, “komunikasi politik adalah proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang – orang, lembaga – lembaga atau kekuatan – kekuatan politik dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik, sedangkan yang dimaksud dengan politik tidak lain adalah kehidupan bernegara”<sup>1</sup>. Secara fleksibel, “komunikasi politik merupakan komunikasi yang mengacu pada kegiatan politik”. Dengan demikian semua kegiatan bernuansa politis, yang dilakukan oleh pemerintah, atau kekuasaan negara beserta institusi pendukung maupun yang dilakukan<sup>2</sup>

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif yang mana maksud nya adalah bagaimana dalam sebuah proses interaksi komunikasi, pesan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik, dan memberi efek pada si penerima pesan (komunikator). Efek-efek yang diharapkan dalam berkomunikasi antara lain efek kognitif (pengetahuan), efek pada sikap, maupun efek pada perilaku. Melalui informasi dan pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi, seseorang yang tadinya tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu, menjadi lebih paham akan pesan yang disampaikan.

Sehingga, dalam menyampaikan pesan agar sesuai dengan tujuan komunikasi yang efektif, komponen-komponen komunikasi seperti communicator

<sup>1</sup> Bambang Setiawan, komunikasi politik dan ketahanan nasional, (Yogyakarta: Aditya media 1990) 67

<sup>2</sup> Nimmo, D., Sanders handbook of political Communications hal 58



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(komunikator), message (pesan), channel (media), dan communicant (komunikan) harus diperhatikan, agar komunikasi yang dilakukan dapat memberikan efek bagi penerima.

Dalam komunikasi politik unsur komunikasi merupakan komponen yang sangat menentukan sebagai mana mengambil pendapat Mansfield dan Weaver diantaranya Komunikator, pesan, media atau saluran, penerima dan efek. Keberhasilan komunikasi politik ditentukan oleh strategi komunikasi yang dilakukan oleh komunikator politik.

Strategi komunikasi politik merupakan tentang bagaimana proses komunikasi yang terjadi di dalam pemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon Legislatif atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya.

Strategi Komunikasi Politik adalah rencana yang meliputi metode, teknik dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional untuk mencapaitujuan dan sasaran.

Era reformasi membawa perubahan mendasar dalam perpolitikan Indonesia. Hal itu membuat tuntutan semakin banyak dari masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Dan hal ini disebabkan karena keinginan besar masyarakat untuk memperoleh sesuatu yang baru dibandingkan sebelum reformasi. Pada masa itu dimana masyarakat mengalami pengengkangan dalam kepemimpinan Soeharto khususnya partisipasi masyarakat yang terbatas. Dalam hal ini usaha sebagai pelaksana perubahan mutlak harus dilakukan pemerintahan Habibie sebagai pelaksana perubahan dari pemerintahan terdahulu. Salah satu agenda nasional yang harus dijalankan oleh pemerintahan Habibi dalam era reformasi adalah desentralisasi, otonomi daerah dan perubahan politik.<sup>3</sup>

Perubahan politik yang harus dilakukan di era reformasi adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga permasalahan sistem politik yang harus

<sup>3</sup> Syaukani, Affan Gaffar dan Ryias Rasyid, Otonomi Daerah Negara Kesatuan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 183.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbaiki. Demokrasi kepemimpinan Soeharto banyak sekali kritikan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat mengenai pemerintahan Indonesia yang menjadi tantangan di masa Demokrasi kepemimpinan Habibie untuk merubah menjadi demokrasi yang berdaulat.

Menurut Alfian, sebagaimana dikemukakan Rozidetano, suasana yang demokratis akan tercapai atau terpenuhi apabila ada dukungan masyarakat, sedangkan dukungan tersebut akan datang jika anggota masyarakat merasa kehendak-kehendak dan kepentingan-kepentingan mereka mendapat saluran yang baik.<sup>4</sup>

Dari hal tersebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan politik, agar masyarakat merasa bahwa mereka juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya. Salah satu kegiatan penting yang harus diikuti oleh masyarakat adalah pelaksanaan pemilu. Pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.

Negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Rakyat dapat melakukan partisipasi politik dengan jalan damai berdasarkan peraturan pemilu yang telah disepakati.<sup>5</sup> Rakyat adalah salah satu elemen penting dalam pemerintahan dan pergantian kepemimpinan nasional. Sehingga harus ada mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat.

Dapat dilihat mekanisme pemilu pada 1999-2019 yang dilakukan secara langsung dan terbuka. Mekanisme pemilihan umum yang digunakan, peserta pilih secara langsung diarahkan hanya memilih partai mana yang akan dipilih, yang kemudian pengurus partai sendiri yang akan memutuskan siapa yang akan mewakili masyarakat di pemerintahan. Kemudian terjadi perubahan mekanisme pada pemilu 2004 di era Presiden Megawati Soekarno Putri, rakyat sebagai pilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai

<sup>4</sup> Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka : 2008) 46



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil mereka dengan sedikit campur tangan dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakil rakyat. Perubahan ke arah kehidupan yang lebih demokratis mulai berlangsung di Indonesia.

Pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstitusi mengamanatkan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar jika sistem pelaksanaan pemilihan umum menjadi aspek utama yang dievaluasi secara terus menerus<sup>5</sup>

Pilkada Serentak 2019 adalah Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak dengan pemilihan Legislatif.

Meski telah menempuh beberapa cara, seringkali keputusan yang diambil anggota dewan belum bisa mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini mencerminkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Penjaringan aspirasi masyarakat perlu lebih diefektifkan dengan melibatkan anggota dewan secara langsung.

Salah satu yang dilakukan oleh anggota dewan adalah mengefektifkan kegiatan reses dengan cara berdialog dengan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya, sehingga pelaksanaan program serta evaluasi

<sup>5</sup>.Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka : 2008) 78

<sup>5</sup>Susanto E.H dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum,(jurnal kajian komunikasi:2013) 163-172



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, reses juga dilakukan untuk memaksimalkan kinerja anggota dewan

Hal ini dilakukan sebagai langkah tanggung jawab setiap wakil rakyat di daerah pilihan masing-masing. Dengan cara berkomunikasi dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing, serta berusaha memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dalam bentuk anggaran. Serap aspirasi masyarakat merupakan agenda rutin dari setiap anggota dewan yang disebut dengan masa reses. Masa reses ini merupakan bentuk komunikasi anggota dewan pusat (Republik Indonesia), Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Tujuan dari reses tersebut untuk mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang sudah memilihnya, reses juga menjadi sesuatu yang ditunggu para wakil rakyat, yang juga menjadi waktu istirahat, masa reses dapat dimanfaatkan untuk bertemu keluarga jauh maupun dekat di kampung halaman dan reses dimanfaatkan untuk bertemu dengan masyarakat di daerah pemilihannya

Berbicara serap aspirasi dalam kegiatan reses. Peneliti melihat fenomena kegiatan komunikasi politik anggota DPRD dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota, yang meliputi Kecamatan Lareh Sago Halaban, Luhak, dan Situjuh. Dalam prosedurnya kegiatan komunikasi politik anggota dewan, pada masa reses dilaksanakan setiap satu tahun tiga kali. Setiap anggota dewan memiliki cara yang berbeda-beda dalam setiap melakukan komunikasi politiknya.

Kegiatan reses ini untuk bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat sehingga setiap anggota dewan harus memaksimalkan bagaimana komunikasi yang tepat. Dari berbagai aspirasi masyarakat yang sudah dipaparkan disetiap kegiatan reses, akan menjadi sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak sedikit aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada wakilnya, yang itu juga akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi masyarakat.

Dalam kegiatan reses kabupaten lima puluh kota terdapat perubahan prosedur yang baru di keluarkan, yaitu semua anggaran dan ketentuan titik daerah yang akan dikunjungi berada di tangan Sekertaris Dewan (Setwan).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Dewan menurunkan surat kepada setiap titik, setelah itu melakukan registrasi kepada setiap titik daerah yang ditentukan, undangan disebarakan sampai sekitar 80 masyarakat. menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan reses menurut anggota dewan Kabupaten Lima puluh kota, hal ini menjadi permasalahan dalam melakukan kegiatan reses, yang membuat kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat terhambat

Dengan latar belakang yang terjadi di DPRD Kabupaten lima puluh kota, tidak sedikit yang harus diurai di dalamnya. Namun peneliti memfokuskan pada komunikasi politik anggota DPRD kepada konstituennya. Melihat keefektifan dari serap aspirasi masyarakat yang akan dijadikan kebijakan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Yang sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui hasil dari serap aspirasi masyarakat tersebut. Karena timbulnya masalah dalam kegiatan reses yang sudah di terangkan, masyarakat juga tidak banyak mengetahui apa sebenarnya reses itu dan apa tujuan dari reses itu juga perlu diperhatikan anggota DPRD di dalam komunikasi politiknya. Karena penting bagi masyarakat yang lain juga untuk mengeluarkan aspirasinya selain dari masyarakat yang biasa diundang dalam kegiatan reses tersebut. Dari masalah yang sudah dijelaskan diatas peneliti tertarik mengangkat topik “Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam Melakukan Reses Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”.

## 1.2 Penegasan istilah

### 1.2.1 Strategi Komunikasi Politik

Strategi juga bermakna sebagai suatu rencana yang berskala besar dengan orientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran tertentu. Strategi mencerminkan cara seseorang bagaimana, kapan, dan dimana seseorang harus bersaing, melawan siapa, dan untuk tujuan apa. Menurut Onong “strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai



tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”. Dalam strategi komunikasi peran komunikator sangatlah penting Agar dapat menghasilkan komunikasi yang efektif maka harus mengenal khalayak, penyusunan pesan penentuan teknik menyampaikan pesan dan memilih media.

Menurut Cangara, Komunikasi politik adalah satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

### 1.2.2 Masa Reses

Reses adalah masa dimana anggota DPR/DPRD berhenti masa sidangnya, untuk kunjungan ke daerah pilihannya masing-masing dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.

### 1.2.3 Daerah Pemilihan (Dapil)

Dapil dalam UU Nomor 12/2003 Bab V, pasal 46 merupakan provinsi atau bagian-bagian provinsi untuk untuk DPR-RI, Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota untuk DPRD-Provinsi dan Kecamatan untuk DPRD Kabupaten/Kota. Setiap dapil mendapatkan alokasi kursi tertentu, yang jumlahnya baik secara provinsi maupun Kabupaten/kota telah ditetapkan oleh UU, dengan ketentuan sebagai berikut:

“Dapil untuk pemilihan DPR-RI mendapatkan alokasi anantara 3-12 kursi, dalam pasal 46 ayat 2. Sedangkan untuk pemilihan DPRD-Provinsi alokasinya juga antara 3-12 kursi dengan jumlah secara provinsial (untuk tiap provinsi), ditetapkan melalui batasan jumlah penduduk. Hal ini berlaku sama untuk pemilihan DPRD-Kabupaten/Kota, di dalam pasal 49 dan 50”

UU No. 12 Tahun 2013. Dan untuk pemilihan DPD ditetapkan secara provinsial dengan alokasi sebanyak 4 kursi setiap provinsi, di dalam pasal 51 dan 52.” UU No. 12 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa penetapan Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap dapil mendapatkan alokasi kursi sebanyak 3- 12 kursi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang artinya baik Dapil maupun alokasi kursi untuk setiap Dapil ditentukan oleh KPU dan tidak ditetapkan melalui UU. Undang-undang hanya menetapkan jumlah keseluruhan dan alokasi secara nasional, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 47 yang menjelaskan tentang alokasi kursi untuk setiap DPRD.

### 1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana Bentuk Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD KAB.50 KOTA dalam melaksanakan Reses di Daerah Pemilihan 3?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Komunikasi Politik anggota DPRD KAB.50 Kota dalam melaksanakan Reses di Daerah Pemilihan 3

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### A. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai perencanaan komunikasi yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada studi program Ilmu Komunikasi
2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD dalam melaksanakan Reses di daerah pemilihan masing-
3. Penelitian ini ditujukan sebagai tugas akhir memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) pada jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.

#### B. Manfaat praktis

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak (pembaca) yang ingin mendalami bidang konsentrasi Public Relations (Humas)
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi para anggota dewan dalam melakukan reses

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan serta menambah wawasan penulis

### 1.6 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan Penelitian dan Sistematika penulisan
- BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**  
Bab ini berisikan Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan Kerangka Pikir
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**  
Bab ini berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Validasi Data dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**  
Bab ini berisikan tentang sejarah dan kondisi geografis lokasi penelitian, struktur organisasi, visi misi, dan nama anggota DPRD beserta fraksinya
- BAB V : HASIL PENELITIAN**  
Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan
- BAB VI : PENUTUP**  
Bab ini adalah bab terakhir dari skripsi yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

Ada sembilan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Goby Rahmat Fauzy pada tahun 2018, penelitian yang berjudul ” Komunikasi Politik Winarti Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang (Studi Kasus Kemenangan Winarti Terhadap Incumbent)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk komunikasi politik winarti dan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam kemenangan Winarti di Kabupaten Tulang Bawang Penelitian ini adalah penelitian (field Research) yaitu suatu penelitian yang di lakukan dalam kehidupan sebenarnya. Menurut sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Winarti sebagai Bupati Tulang Bawang. Metode penelitian yang di pakai yaitu metode interview dan dokumentasi data yang di peroleh dan di analisis secara teliti.
2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rahmawan Cibro dengan judul penelitian yaitu “Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Singkil(Studi Kasus Tentang Strategi Komunikasi Politik Pasangan Dulmusrid-Sazali Pada Pemilihan Bupati Aceh Singkil 2017” Penelitian ini di latar belakanginya pentingnya strategi komunikasi politik untuk pemenangan dalam pemilihan kepala daerah Aceh Singkil .tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi politik dalam memenangkan pasangan bupati dan wakil bupati.teori yang dipakai dalam penelitian ini teori Strategi komunikasi politik dan uraian-uraian teori pendukung lain nya tentang strategi komunikasi politik .metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif.narasumber penelitian ini tim pemenangan dan bupati.teknik pengumpulan data yang digunakan adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan wawancara dengan narasumber dan juga melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik pasangan dulmusrid-sazali dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dari komponen komunikasi yakni komunikator, isi pesan, media, komunikasi dan umpan balik. Kemudian melalui pertimbangan komunikasi tersebut strategi komunikasi memberi kemenangan pasangan dulmusrid-sazali dalam pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati tahun 2017.

3. Penelitian berikutnya adalah penelitian dari Basith Bakhtiar Yulfi yang berjudul "Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Purworejo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada masyarakat Muslim di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini fokus membahas komunikasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode non statistic yaitu analisis kualitatif
4. Penelitian selanjutnya oleh Faditnya Prayogo yang berjudul "Komunikasi Politik Adies Kadir Sebagai Calon Legislatif DPR RI Dalam Pemilihan Umum 2014". Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, yaitu apa saja strategi yang digunakan oleh Adies Kadir serta bagaimana strategi politik tersebut dilaksanakan agar mencapai tujuan yang diharapkan, berdasarkan pengalamannya ketika mencalonkan diri saat pemilihan umum 2009 dan bagaimana pola komunikasi politik Adies Kadir di dalam pemilihan umum 2014. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi politik dalam lingkup pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan wawancara, observasi dan juga bantuan dari data-data sekunder yang didapatkan

5. Penelitian selanjutnya dari Berliana Betris dari Universitas Andalas dengan judul penelitian “Komunikasi Politik Walikota Independen Ramlan Nurmatias Pada Pemerintahan Kota Bukittinggi Pada tahun 2015-2020” Studi kasus ini dapat merubah pandangan mengenai kepala daerah independen dan bahkan sekarang dianggap sebagai suatu keunggulan dalam pemerintahan. Dengan komunikasi politik sebagai salah satu penunjang keberhasilan interaksi antara kepala daerah dengan anggota legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang disertai dengan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa etik dan emik. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dilapangan, maka dilakukan teknik triangulasi.
6. Penelitian selanjutnya dari Ervi Yumika Sari yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik PDI-Perjuangan Pada Pemilihan Legislatif Tanjung Pinang Tahun 2009” Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik PDIP pada pemilihan legislatif tanjungpinang tahun 2009. Dalam penelitian ini jumlah Informan sebanyak 10 orang yang berasal dari pengurus DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang serta masyarakat atau simpatisan, dan metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data secara wawancara/interview, pengumpulan data dengan dokumen, untuk menganalisa Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Kota Tanjungpinang tahun 2009.
7. Penelitian selanjutnya adalah jurnal dari Khoiruddin Muchtar dari UIN Sunan Gunung Djati jurnal yang berjudul “Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai” Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran tentang upayaupaya Partai Golkar dalam membentuk citra sebagai partai baru yang dinamis dan modern serta bagaimana strategi Golkar memperkenalkan diri sebagai partai kosmopolit . Penelitian ini juga ingin memperoleh gambaran, bagaimana golkar mempertahankan eksistensi dan citra partai, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

8. Penelitian Efektifitas Reses Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupal, dan Kecamatan Rupal Utara), oleh Qory Kumala Putri dan M. Y. Tiyas Tinov. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif(campuran) yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: Reses anggota DPRD Kabupaten Bengkalis efektif dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengukuran yang penulis lakukan dengan menggunakan skala *liker*, dimana jumlah skor yang Diperoleh dari peneliti adalah 957 atau 68,36%, dari yang diharapkan yaitu 100%.
9. Penelitian kedua, “Kinerja DPRD dalam melaksanakan kekuasaan legislasi (Studi Di DPRD Kota Malang)” oleh Sofyan Arief, SH. Metode penelitian ini adalah diskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi legislasi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemahaman DPRD Kota Malang terhadap legislasi masih kurang meskipun sudah beberapa kali dilakukan pelatihan-pelatihan Legal Drafting baik yang dilakukan di tingkat pusat, propinsi maupun Daerah, perubahan konstitusi yang kemudian diikuti dengan perubahan beberapa peraturan perundang- undangan tidak berdampak pada peningkatan produktivitas DPRD dalam memproduksi

Rancangan Peraturan Daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam melaksanakan kekuasaan Legislasi setelah berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menunjukkan mempunyai semangat perubahan ke arah yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Lembaga Legislatif

Menurut Miriam Budiharjo, parlemen yang berada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan umum (Pemilu). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 40, menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, Pasal 42 ayat (1) menjelaskan tugas dan wewenang DPRD meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>7</sup>

1. Membentuk peraturan daerah (perda) yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan tentang pelaksanaan perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

<sup>6</sup> Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka : 2008), 322.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 40 dan pasal 42 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD propinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah.
10. Memberikan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
11. Memberi persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Menurut Muslimah Hanim, sebagaimana yang dikemukakan Qary kumala yang dimaksud dengan perwakilan (representative) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk membicarakan dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Saat ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representative).<sup>8</sup>

Muslimah Hanim menjelaskan bahwa pada umumnya perwakilan politik mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang-orang populer karena reputasi politiknya, akan tetapi belum tentu mempunyai kemampuan serta menguasai masalah-masalah teknis pemerintah, perekonomian, dan lain

---

<sup>8</sup> Qary K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, "Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara)" Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online), 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Sedangkan para ahli dalam bidang tersebut sukar terpilih melalui perwakilan politik ini.

## 2.2.2 Komunikasi Politik

### 2.2.2.1 Pendekatan Komunikasi Politik

Konsep komunikasi politik lahir kerana adanya perpaduan komunikasi dengan aktifitas politik. Dunia Politik yang kerap dikaitkan dengan kemewahan dan kekuasaan membuat banyak orang tergiur untuk menjadikannya ladang untuk menuai rupiah. Namun ada pula yang menjadikan dunia politik sebagai ajang atau sarana untuk memperoleh kuasa lebih agar dapat memperbaiki dan menjadikan bangsa ini mejadi lebih baik dengan segala keputusan dan kebijakan yang dapat membantu masyarakat itu sendiri.

Politik merupakan motor pemerintahan di suatu negara. Politik yang baik adalah politik yang berasakan demokrasi. Karena dengan politik yang berasaskan demokrasi maka masyarakat bisa turut serta dalam proses pengambilam suatu keputusan. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang menyatakan semua keputusan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat". Masyarakat berhak mengemukakan pendapatnya karena masyarakat sendirilah yang mengetahui kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pemilihan umum masyarakat harus memilih secara langsung calon pemimpin atau wakil rakyat tersebut agar sesuai dengan visi dan misi dan strategi yang tentunya berpihak terhadap masyarakat bukan individu atau kelompok tertentu.<sup>9</sup>

### 2.2.2.2 Pengertian Strategi Komunikasi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan peertempuran untuk memenangkan peperangan.sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk

<sup>9</sup> Sudianto,komunikasi politik,(jakarta:PT Raja grafindo pustaka:2016) 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan (universal).<sup>10</sup>

### 2.2.2.3 Unsur Komunikasi Politik

Dalam komunikasi politik unsur komunikasi merupakan komponen yang sangat menentukan sebagai mana mengambil pendapat Mansfield dan Weaver diantaranya Komunikator, pesan, media atau saluran, penerima dan efek. Keberhasilan komunikasi politik ditentukan oleh strategi komunikasi yang dilakukan oleh komunikator politik.<sup>11</sup>

Komunikasi politik tidak hanya hubungan dalam membangun partai politik, tapi diantaranya hubungan lembaga pemerintah legislatif dan eksekutif. Sebagai sumber yang berperan dalam komunikator politik diantaranya, seperti: Presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, Gubernur, bupati atau wali kota, dan lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok yang mampu melakukan presur politik kepada pemerintah.

Di lain pihak jika tidak ada strategi komunikasi yang baik efek dari proses komunikasi (terutama komunikasi media massa) bukan tidak mungkin akan menimbulkan pengaruh negatif. Sedangkan untuk menilai proses komunikasi dapat ditelaah dengan menggunakan model-model komunikasi. Dalam proses kegiatan komunikasi yang sedang berlangsung atau sudah selesai prosesnya untuk menilai keberhasilan proses komunikasi tersebut terutama efek dari proses komunikasi tersebut digunakan telaah model komunikasi.

Menurut Onong Uchjana Effendi strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen (communications management) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> Ibid 2-3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi”<sup>12</sup>.

Strategi komunikasi dalam politik merupakan salah satu kunci keberhasilan sebuah Partai politik dalam memenangkan pemilu. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki asas demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali kepada kepentingan rakyat melalui perwakilan anggota legislatif. Strategi itu pada hakikatnya adalah satu perencanaan (planning) dalam manajemen untuk mencapai tujuan tertentu.

#### 2.2.2.4 Peran Komunikasi Politik

Peran komunikasi politik sebagai wujud dari strategi komunikasi politik hendaknya harus melihat situasi dan kondisi dari setiap individu atau masyarakat, dengan demikian strategi komunikasi yang dilakukan pada masing-masing individu atau masyarakat tadi tidaklah sama. Sebagai contoh: strategi komunikasi pengembangan masyarakat pantai akan berbeda dengan strategi komunikasi pengembangan masyarakat kota.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam menyusun strategi komunikasi politik adalah:

##### 1. Komunikator Politik

Maksudnya adalah siapa yang akan menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran, bisa berupa individu bisa pula berupa lembaga. Komunikator hendaknya memiliki persyaratan yaitu memiliki kredibilitas dan keahlian (skill).

##### 2. Politikus sebagai komunikator politik

Orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Dinamakan calon atau pemegang jabatan inti adalah politikus, tak peduli apakah mereka dipilih ditunjuk, atau pejabat karier. Daniel Katz menunjukkan bahwa pemimpin politik mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah

<sup>12</sup> effendy, onong uchjana, Dimensi-dimensi komunikasi, (Bandung: PT Alumni: 2009) hal 84



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan demikian. Maksudnya, Dalam kewenangannya yang utama politikus itu berkomunikasi sebagai wakil atau suatu kelompok atau langganan; pesan-pesan politikus itu menunjuk dan atau melindungi tujuan kepentingan politik, artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok

#### 3. Profesional sebagai komunikator politik

Komunikator profesional mengendalikan keterampilan yang khas dalam mengolah simbol-simbol.

#### 4. Aktivis sebagai komunikator politik

Unsur dasar dalam jaringan komunikasi politikus adalah aparat formal pemerintah.

#### 5. Pesan-pesan apa yang hendak disampaikan

Berisikan hal-hal apa yang ingin diinformasikan kepada khalayak sasaran. Apakah tentang gizi?, tentang perlunya menjaga lingkungan, perlunya menjaga habitat orangutan dan sebagainya.

#### 6. Pengaruh apa yang diinginkan (effect)

Setiap strategi komunikasi ingin mencapai tujuan tertentu pada diri khalayak sasarannya. Tujuan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam diri khalayak yaitu:

- a. Terjadinya perubahan pendapat (to change the opinion)
- b. Terjadinya perubahan sikap (to change the attitude)
- c. Terjadinya perubahan perilaku (to change behavior)

Dalam menyampaikan informasi, para komunikator menggunakan saluran komunikasi politik dan saluran komunikasi persuasif. Tipe-tipe saluran komunikasi politik dibedakan menjadi tiga, yaitu :

#### a. Komunikasi Massa

Komunikasi Massa merupakan proses dalam penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator politik kepada komunikan atau khalayak umum melalui media massa, seperti media elektronik dan media cetak. Media ini sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap keberhasilan suatu calon dalam pemilihan umum

b. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Interpersonal merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada komunikan secara langsung atau tatap muka (face to face). Misalnya saja dialog.

c. Komunikasi lembaga organisasi

Merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator politik kepada komunikan atau komunikasi vertical (dari atas ke bawah) dan horizontal (dari kiri ke kanan) sejajar. Contoh dalam pemilihan umum yaitu komunikasi antar pasangan calon dan tim suksesnya.

### 2.2.2.5 Tujuan Komunikasi Politik

Wayne, Peterson dan Dallas mengungkapkan bahwa strategi komunikasi politik memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah :

1. Untuk memastikan terjadinya satu pengertian
2. Untuk mempertahankan pesan dan dapat diterima dengan baik
3. Untuk meningkatkan motivasi
4. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai komunikator

Komunikasi politik diletakkan pada telaah kritis ranah ilmu komunikasi, yakni komunikasi teknis, komunikasi terapan dan teori komunikasi

1. Pada tingkat teknis komunikasi politik

Menyangkut kiat komunikasi yang spesifik, misalnya cara melepaskan desas-desus (rumor), membuat pesan yang membangkitkan keresahan, memanipulasi informasi dari angle liputan kamera, atau penampilan gambar yang memberi kesan pengikut kampanye yang sepi. Kiat seperti ini biasanya berkembang dari lapangan kemudian didesain sedemikian rupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, penggunaannya lebih tergantung pada keterampilan, naluri, kejelian, dan improvisasi dari pelaku dengan berbagai ragam variasi.

2. Pada tingkat terapan

Komunikasi politik berkembang dari penelitian dan teori, dan setelah itu dimanfaatkan dalam kegiatan. Ruang lingkup komunikasi terapan lebih luas, dan menyangkut penerapan beraneka ragam teori. Misalnya, penggunaan analisis isi untuk evaluasi efektivitas komunikasi politik, pemilihan khalayak sasaran yang paling peka, dan desain komunikasi yang paling potensial untuk mempengaruhi penggunaan riset dan teori persuasif untuk penentu strategi propaganda dalam kampanye, dan sebagainya.

3. Pada tingkat teoretis

Komunikasi politik menguji kesahihan teori komunikasi dalam konteks politik. Termasuk teori keperkasaan dan keterbatasan media teori kepemimpinan pendapat (opinion leader), teori inovasi, faktor-faktor pengaruh komunikasi, penggunaan metode jaringan dalam kaitanya dengan koneksi politik dan kekuasaan.

Peranan komunikator dalam masyarakat, salah satunya dapat dilihat dalam kaitanya dengan karakteristik pribadi mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, Morris dan seaman menyatakan bahwa karakteristik pemimpin yang berpengaruh terhadap kelompok diantaranya adalah pandangan, sikap, kedudukannya dalam kelompok, dan lamanya seseorang menempati kedudukan tersebut.

### 2.2.2.6 Fungsi Komunikasi Politik

Menurut Mc Nair bahwa fungsi komunikasi politik diantaranya:

1. Memberikan informasi kepada khalayak politik dan media komunikasi sebagai fungsi pengamatan, serta sebagai monitoring terhadap khalayak politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mendidik masyarakat dengan memberikan pemahaman yang realistis terhadap demokrasi
3. Membuat perencanaan atau platform dalam bentuk solusi terhadap masalah-masalah politik dalam mengimbangi opini yang berkembang terhadap dinamika demokrasi
4. Membuat transparansi informasi yang mampu memberikan perilaku kritis terhadap pemegang kebijakan atau pemerintah dan lembaga politik
5. Media politik sebagai media informasi bagi khalayak sehingga dapat memfasilitasi kebijakan politik<sup>13</sup>

#### 2.2.2.7 Strategi Calon Legislatif (Memenangkan Pemilu)

Tidak sedikit dipasangkanya calon legislatif dipasangkan dengan artis, atau tokoh nasional adalah upaya partai untuk mendulang suara sebanyak mungkin pada pemilu legislatif. Strategi umum partai tersebut meski relatif miskin visi, tetapi cukup efektif dalam meraih simpati publik. Akan tetapi ada satu catatan, sejauh mana sebenarnya strategi dari caleg-caleg tersebut. Mengingat kompetisi yang cukup ketat terjadi diantara mereka dalam satu partai dan diantara caleg lain. Bahkan kedangkala terjadi persaingan sengit antara caleg

Terkesan ketika kita melihat hasilnya, di mana ketokohan seseorang di tingkat nasional belum tentu bisa diterima begitu saja di tingkat daerah. tidak sedikit akhirnya banyak figur-figur yang baru muncul dari daerah mampu menggantikan figur-figur lama. Kampanye politiknya yang di lakukan dalam ritme panjang menjadi sangat penting dalam strategi komunikasi politik ini. Kecenderungan lebih banyak partai memasang tokoh-tokoh nasional untuk mendongkrak perolehan suara, lebih sering merupakan langkah spekulatif. Akibatnya, kehadiran komunikator belum diterima secara utuh oleh khalayak politik di daerah.

<sup>13</sup>Cangara, Hafied, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Strategi (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada: 2014) 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.2.8 Pendekatan Strategi Politik

Terdapat tiga jenis pendekatan strategi komunikasi politik dalam mencapai tujuan politik yang diharapkan Anwar Arifin yakni sebagai berikut:

1. Ketokohan dan kelembagaan, merupakan pendekatan strategi komunikasi yang dilakukan dengan merawat ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam lingkungan masyarakat, sehingga memiliki pengaruh tersendiri dalam komunikasi politik yang dilakukan. Juga kemampuan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan. Ketokohan yang memiliki kredibilitas dan daya tarik tersendiri, juga kelembagaan yang besar dan terpercaya akan menjadi kekuatan politik tersendiri dalam membangun komunikasi politik yang efektif.
2. Menciptakan kebersamaan, merupakan pendekatan strategi komunikasi yang dilakukan dengan menciptakan kebersamaan antara politikus dan masyarakat dengan tujuan untuk mengenal masyarakat secara lebih dekat agar dapat menyusun pesan yang homofili. Namun untuk terciptanya pesan yang homofili, maka politikus harus terlebih dahulu mengenal, mengerti, dan memahami daya tangkal dan daya serap seorang khalayak, oleh karena itu seorang politikus membutuhkan berbagai aktivitas penjajakan dan observasi secara langsung yang harus dilakukan.
3. Membangun konsensus, merupakan pendekatan strategi komunikasi yang dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik, antara para politikus dalam partai politik yang sama ataupun partai politik yang berbeda, dengan tujuan menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui bersama-sama diantara satu sama lain. Hal tersebut biasa terjadi pada saat rapat ataupun loby yang dilakukan, dengan demikian untuk terciptanya dalam membangun konsensus ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka seorang politikus harus melakukan model komunikasi yang interaktif diantara satu sama lain.

### 2.2.2.9 Bentuk-bentuk Komunikasi Politik

adapun bentuk yang biasa digunakan oleh para kandidat diantaranya:

1. Retorika politik, merupakan seni berbicara yang awal mulanya digunakan dalam perdebatan-perdebatan di ruang sidang pengadilan, bermaksud agar dapat saling mempengaruhi. Kemudian seni berbicara tersebut pada akhirnya berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, dimana para kandidat bicara kepada orang banyak untuk berorasi dengan maksud merubah perilaku khalayak yang mejadi target tersebut.
2. Agitasi politik, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membangkitkan rakyat terhadap suatu gerakan politik, dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi khalayak, baik secara lisan maupun tulisan. Dimulaidengan cara membuat kontradiksi dalam masyarakat, kemudian menggerakkan khalayak untuk menentang kenyataan realita hidup yang terjadi dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat.
3. Propaganda politik, merupakan kegiatan kebohongan politik yang dilakukan dengan berbagai cara dalam menyebarkan suatu ideologi. Penggunaan propaganda politik ini, secara intensif dalam politik yaitu dilakukan oleh Hitler pada saat perang dunia II.
4. Kampanye politik, merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan seorang kandidat dalam waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik dari khalayak. Kampanye politik dapat dilakukan dengan melalui media massa, interpersonal,serta organisasi

### 2.2.2.10 Teori Empati dan Teori Homofili

Komunikasi dalam hal strategi teori dapat membantu memberikan pemahaman melalui pengetahuan sebagai ujian kelayakan teori sebagai hububungan teoritis dan empiris. Atau suatu konklusi dari beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statemen yang satu dengan statemen yang lainnya. Dari sekian banyak teori komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Strategi komunikasi politik yang memadai adalah Teori Empati dan Teori Homofili. Penulis akan menggunakan teori empati dan teori homofili sebagai unit analisis untuk membedah komunikasi politik yang dilakukan para anggota DPRD Dapil 3 dalam melakukan Reses

Secara sederhana empati adalah kemampuan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Dalam hal ini David K. Berlo memperkenalkan teori yang dikenal dengan nama *influence theory of empathy* (teori penurunan dari penempatan diri kedalam diri orang lain). Artinya, komunikator mengandaikan diri, bagaimana kalau ia berada pada posisi komunikan. Dalam hal ini individu memiliki pribadi khayal sehingga individu-individu yang berinteraksi dapat menemukan dan mengidentifikasi persamaan-persamaan dan perbedaan masing-masing, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian<sup>14</sup>

Menurut Daniel Learner empati adalah kesanggupan seseorang melihat diri sendiri kedalam situasi orang lain dan kemudian melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, individu harus memiliki kepribadian mobil, yaitu kepribadian yang mudah bergerak dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi orang lain.

Menurut Daniel Learner empati adalah kesanggupan seseorang melihat diri sendiri kedalam situasi orang lain dan kemudian melakukan penyesuaian. Dalam hal ini, individu harus memiliki kepribadian mobil, yaitu kepribadian yang mudah bergerak dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi orang lain.<sup>15</sup>

Dalam komunikasi politik, kemampuan memproyeksikan diri sendiri ke dalam titik pandang dan empati orang lain memberi peluang kepala seorang politikus untuk berhasil dalam pembicaraan politiknya. Akan tetapi, menempatkan diri sendiri sebagai orang lain itu

<sup>14</sup> Anwar, arifin, komunikasi politik, (jakarta:2003) 33

<sup>15</sup> Cangara, hafied, Komunikasi Politik "konsep, Teori, Strategi" (jakarta: PT. Rajagrafindo persada:2014) 54

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang tidak mudah. Justru itu, empati dapat ditingkatkan atau dikembangkan oleh seorang politikus melalui komunikasi sosial dan komunikasi politik yang sering dilakukan. Dengan demikian empati dalam komunikasi politik adalah sifat yang dekat dengan citra politikus tentang diri dan tentang orang lain. Itulah sebabnya empati dapat dinegosiasikan atau dimantapkan melalui komunikasi antar personal.

Dalam usaha melakukan empati dalam peristiwa komunikasi, Rogers dan Shoemaker memperkenalkan homofili. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan individu untuk menciptakan kebersamaan, baik fisik maupun mental. Dengan homofili dapat tercipta hubungan-hubungan sosial dan komunikasi yang intensif dan efektif.<sup>16</sup>

Istilah homophily ini berasal dari kata Yunani *Homois*, yang artinya sama (alike) atau serupa (equal). Jadi homofili berarti komunikasi dengan orang yang sama, yaitu derajat orang yang berkomunikasi memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Homofili dapat digambarkan sebagai suasana dan kondisi kepribadian dan kondisi fisik dua orang berinteraksi karena memiliki kebersamaan usia, bahasa, pengetahuan, kepentingan, organisasi, agama, suku bangsa, dan pakaian.

Melalui kesamaan agama, suku, dan kepentingan. Maka empati dan homofili dalam komunikasi politik diaplikasikan ke dalam bentuk ideologi politik yang sama, visi dan misi politik yang sama, doktri politik yang sama, pakaian yang sama dan keputusan politik yang sama.

Komunikator berperan dalam komunikasi interpersonal sebagai upaya melakukan pendekatan kepada khalayak politik. Pada penerapannya Anwar Arifin menggolongkan ada lima kecenderungan teori dan model dasar komunikasi politik sebagai berikut:

1. Teori jarum hipodermik

Komunikasi politik dapat berproses secara mekanistik atau cepat ketika informasi politik diterima khalayak.

2. Teori khalayak kepala batu

<sup>16</sup> Sudiarto, komunikasi politik, (jakarta: PT Raja grafindo pustaka: 2016) 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori ini membuat khalayak mempunyai kekuatan terhadap ransangan politik serta setiap individu sangat aktif dalam menyeleksi perilaku politik.

3. Teori Empati dan Homofili  
Kemampuan khalayak dalam menempatkan diri pada situasional politik.
4. Teori Informasi dan Nonverbal  
Kemampuan melakukan tindakan politik dapat dipandang komunikasi non verbal bahwa tidak ada komunikasi verbal.
5. Teori Media Kritis  
Kemampuan media menempatkan posisi pada khalayak dalam mempengaruhi kehidupan politik.<sup>17</sup>

#### 2.2.2.11 Reses

Salah satu bentuk komunikasi politik adalah melakukan kegiatan reses yang di laksanakan oleh anggota dewan, Didalam undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, reses para dewan dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di daerah yang diwakilinya. Kegiatan reses juga dijelaskan pada pasal 81 tentang kewajiban anggota DPRD huruf E dan F “kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPR.

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Anwar arifin, komunikasi politik, (jakarta: PT Balai Pustaka: 2003) hal 33

<sup>18</sup> Undang-undang republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat Daerah, Pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

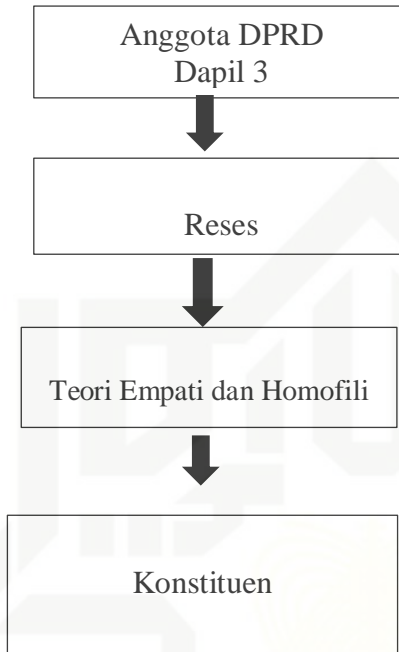
Menurut Zuhri, yang dikemukakan oleh Qory Kumala Putri dan M.Y.Tiyas Tinov reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.<sup>19</sup> Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu konstituen pada daerah pemilihannya masing- masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

<sup>19</sup> Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, "Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009- 2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupert, dan Kecamatan Rupert Utara)" Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1 (Februari 2014), (Artikel Online), 1.

### 2.3 Kerangka Pikir

komunikasi politik anggota



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Komunikasi Politik Anggota DPRD Dalam Melakukan Reses Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”. adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek. Beberapa informan yang sudah ditentukan untuk memperkuat data dari sebuah penelitian dalam komunikasi politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara numeric sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Sehingga dalam penelitian komunikasi politik ini hanya disajikan dalam bentuk deskriptif atau narasi.

Dalam pendekatan ini peneliti terjun langsung ke Kabupaten Lima Puluh Kota yang hanya di ambil sebagian wilayah yaitu wilayah Lareh Sago Halaban, Luhak,dan Situjuh sebagian yang merupakan lokasi penelitian tersebut. Peneliti mendatangi DPRD sesuai dengan dapil yang sudah ditentukan sebagai studi kasus dari penelitian komunikasi politik.

Dalam penelitian ini mencari data langsung dengan melakukan wawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota dewan yang sudah ditentukan sebagai informan atau melakukan percakapan terhadap orang-orang yang bersangkutan, seperti masyarakat yang menghadiri kegiatan reses. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pada permasalahan mengenai komunikasi politik kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, ingin lebih tahu komunikasi politik dalam kegiatan reses anggota DPRD Dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga tidak memungkinkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen berupa angket. Karena pada permasalahan kali ini sangat tepat kiranya jika menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami masalah fenomena-fenomena sosial yang terjadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi metodologi, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Untuk mengungkapkan pemikiran seseorang secara metodeologis, peneliti melakukan beberapa tahap agar bisa mendapatkan data yang sesuai, antara lain;

1. Menyusun pertanyaan yang akan diwawancarakan kepada setiap informan.
2. Menentukan informan yang bersangkutan dalam tema yang akan diteliti.
3. Membuat janji wawancara dengan setiap informan .
4. Menemui setiap informan. Dan informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang benar-benar mengetahui informasi dan mempunyai jawaban dari apa yang akan ditanyakan oleh peneliti.
5. Dan melakukan wawancara dengan setiap informan.

Ada tujuh informan yang ditentukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini yaitu empat anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, dan tiga Konstituen. Dan untuk mengungkap pemikiran delapan informan tersebut dalam penelitian komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ini.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan untuk mendapatkan data yang valid. Melakukan wawancara dengan setiap konstituen dan mendatangi konstituen satu persatu, agar dapat lebih maksimal untuk menggali data. Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap hasil pemikiran informan yang sudah disampaikan. Maka selanjutnya peneliti mengolah data-data secara tertulis dan terstruktur sesuai dengan tema penelitian.

Dari proses tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Basrowi yang mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Individu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan sebagai variabel atau hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, dimana penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Dalam hal ini penentuan judul komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kegiatan reses, agar tidak mencakup terlalu luas dalam melakukan penelitian dan mempermudah mencari ke validan data, maka peneliti memusatkan penelitian pada satu tempat yang dianggap sangat pantas untuk dijadikan pusat yang akan diteliti atau dengan maksud lain adalah studi kasus yang mana data Subjek yang diteliti terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus. Dari tema penelitian tersebut, maka peneliti mengambil studi kasus di Dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai pusat atau fokus dari wilayah penelitian.

Pada penelitian itu bermacam-macam jenisnya, dan dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan analisis jenis data. Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan adalah berupa penelitian yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif analisis yaitu metode dimana penulis mengumpulkan data-data seperti yang sudah dipaparkan diatas yaitu wawancara dengan informan-informan yang bersangkutan dalam tema penelitian ini, selain itu penelitian yang diperoleh juga dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya. Kemudian menguraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya.<sup>20</sup>

Sedangkan, metode deskriptif kualitatif yang berbasis studi kasus yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dan dengan cara deskripsi melalui kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan

<sup>20</sup> Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD (Bandung: Alfabeta 2010), 218-219

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan berbagai macam metode alamiah yang dilakukan dengan baik.<sup>21</sup>

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamatkan di Jalan Aziz Haily, Bukit Limau, Sarilamak Harau, Lima Puluh Kota

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari informan saat peneliti terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan juga kondisi latar penelitian.<sup>22</sup> Informan bukan hanya sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidak penelitian berdasar hasil informasi yang diberikan.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh

<sup>21</sup> Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),

<sup>22</sup> Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran, browsing data internet, dan juga berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi.

### 3.3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang digunakan untuk memberi informasi mengenai kondisi masalah yang di latar belakang penelitian.

1. Informan kunci (*key informan* ) merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota DPRD KAB.50 KOTA
2. Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang juga didapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian yaitu Konstituen yang ada pada wilayah penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlu mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 3.4.1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

#### 3.4.2. Wawancara



Metode wawancara merupakan alat bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Seperti dalam penelitian komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kegiatan reses (studi kasus di Dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditentukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendetail dan berulang sebagai bentuk wawancara mendalam dari teknik pengumpulan data tersebut

Wawancara juga bisa didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti untuk mendengarkan pendapat dan keyakinan isi yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna makna subyektif yang dipahami individu mengenai topik yang diteliti dan untuk melakukan eksplorasi terhadap hal tersebut.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah dengan wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka. Wawancara seperti ini memiliki kelebihan dari segi kekayaan data, akan tetapi sulit untuk mengklasifikasikan jawaban yang diajukan. Wawancara

<sup>23</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm63

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis ini lebih banyak dipergunakan dalam penelitian kualitatif yang menuntut lebih banyak informasi apa adanya tanpa intervensi peneliti.<sup>24</sup>

Wawancara dilakukan dengan terstruktur, sehingga sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk membimbing peneliti dalam mendalami pemahaman yang dilakukan pada saat wawancara. Adapun di dalamnya, topik wawancara akan bisa mengalir sesuai rancangan pertanyaan yang telah disiapkan.<sup>25</sup> Pada wawancara informan akan diarahkan pada fokus terkait pemahaman mengenai bagaimana komunikasi politik anggota DPRD dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kegiatan reses.

### 3.4.3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Adapun data yang terlampir seperti surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama yang data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama/alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu :

<sup>24</sup> E. Kristi Purwandari, Pendekatan Kualitatif Untuk Manusia (Jakarta: LPSP3, 2005), 127.

<sup>25</sup> Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 51

<sup>26</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

### 3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau pemfokusan suatu penelitian dan menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan. Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk memilah setiap data yang didapatkan agar lebih terarah dan terstruktur. Reduksi data ini digunakan peneliti setelah memilih tema, yang akan difokuskan dalam sebuah penelitian.

Peneliti melakukan berkali-kali wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data setelah memfokuskan penelitian tersebut dan data yang dicari dalam penelitian ini. Dari data-data tersebut yang berupa teks maupun dokumentasi yang didapatkan akan di golongkan dalam bentuk data yang valid, yang mana data tersebut sudah dipilah dan diarahkan sesuai dengan jawaban rumusan masalah yang sudah difokuskan. Reduksi data ini dilakukan oleh peneliti dari awal observasi dalam penentuan tema hingga kevalidan data yang sudah terverifikasi.

### 3.5.2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur.

### 3.5.3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti menginterpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif.



### 3.6 Teknik Keabsahan Data

Pada langkah ini penetapan dari keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ketajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak menjadikan hasil hasil temuan peneliti memiliki keakuratan data. Perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan temuan.

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini peneliti memakai keabsahan data sebagai berikut:

#### 1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti memastikan data yang di lapangan benar-benar terkumpul dengan menambah studi penelittian di lapangan. Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak ada kekliruan pada penelitian atau tulisan sehingga data yang diperoleh akan lebih valid. Namun langkah ini memungkinkan peneliti untuk kembali ke lokasi penelitian dengan memerlukan waktu yang lumayan lama.

#### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan disini berarti teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan peneliti dalam kegiatan pengamatan. Ketekunan merupakan sikap mental yang disertai dengan ketelitian dan keteguhan di dalam melakukan pengamatan untuk memperoleh data penelitian. Pengamatan merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis (mata, dan telinga) serta psikologis (daya adaptasi yang didukung oleh sifat kritis dan cermat)

#### 3. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan data dari berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

- a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan juga perlu dilakukan, serta perlunya membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait.
- b. Triangulasi dengan metode. Hal ini dimaksudkan dengan menggunakan metode dengan cara melakukan perbandingan, pengecekan kebenaran dan kesesuaian data penelitian melalui metode yang berbeda. Terdapat dua strategi yaitu:
  - a) Pengecekan derajat kepercayaan menemukan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data.
  - b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Pada penelitian ini, akan dilakukan hal dengan membandingkan data antara di lapangan dengan luar lapangan, dengan perbandingan ini akan memungkinkan peneliti lebih mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Karena disini peneliti akan memilih data yang akan dijadikan laporan yang berikutnya akan dimasukkan ke dalam laporan penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

##### 1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 348.555 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini terletak di anggota timur wilayah provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi.

Sejarah nama kabupaten ini, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang asal-usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabau di Sumatra Barat terdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo Kayo. Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggungan dan Datuak Perpatih Nan Sabatang. Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian peduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru.

Setelah mengetahui daerah-daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam. Daerah sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar. Semetara itu, Datuak Sri Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian dicatumkan angka 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kapur IX merupakan penghasil tanaman gambir terbesar di Indonesia. Gambir bersama dengan karet, semen dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat. Tanaman gambir mengandung zat katechine dan tanin, yang dipakai sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Volume ekspor gambir provinsi Sumatera Barat tahun 2000 akbarnya 1.339.860 kg. Meskipun gambir merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan kabupaten 50 Kota, namun yang menjadi tulang punggung perekonomian kabupaten ini adalah tanaman bahan makanan. Perkebunan dan tanaman bahan makanan, keduanya tergolong dalam sektor pertanian, menjadi penyumbang keaktifan ekonomi utama kabupaten ini.

Kabupaten ini tergolong daerah sangat makmur di Sumatera Barat. Bahkan penduduk di Kecamatan Kapur IX disebut-sebut memiliki pendapatan yang setara dengan gaji bulanan para menteri. Hal ini karena masyarakat Kapur IX memiliki mata pencaharian sebagai penghasil gambir yang langsung diekspor ke Singapura, India, Jepang dan Pakistan. Sayangnya pemerintah daerah ini tidak dapat menyediakan fasilitas infrastruktur yang memadai seperti bursa gambir itu sendiri dan fasilitas telekomunikasi, perlintasan, cairan lepas sama sekali dari kotoran, sehingga potensi kecamatan yang dijuluki negeri "Petro Dollar" ini tidak tergarap optimal

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, letaknya diapit oleh empat Kabupaten dan satu Provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman, serta Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 02528,71 LU - 02214,52 LS dan 1001544,10 BT - 1005047,80 BT. Luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3.354,30 Km<sup>2</sup> yang berarti 7,94 persen dari total luas daratan Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Topologi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Di daerah ini terdapat tiga buah gunung api yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m) dan Gunung Sanggul (1.495 m).

Sebagian besar daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah perbukitan dan lereng. Sekitar 34% dari total luas wilayahnya merupakan daerah lereng dengan klasifikasi lereng >40%.

Sebagian besar daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah perbukitan dan lereng. Sekitar 34% dari total luas wilayahnya merupakan daerah lereng dengan klasifikasi lereng >40

Dan batas-batas wilayah administrasi kabupaten lima puluh kota meliputi:

**Tabel 4.1**  
**batas wilayah kab.lima puluh kota**

Utara	Kampar,Riau
Timur	Kampar,Riau
Selatan	Tanah Datar dan Sijunjung
Barat	Agam dan Pasaman

Dan untuk kondisi demografi data kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini adalah data semester II tahun 2020 dimana jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 385.986 jiwa.

#### 4.2 Sejarah dan kondisi geografis lokasi penelitian

##### 1. Sejarah lokasi penelitian

DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang beralamatkan di Jalan Aziz Haily, Bukit Limau, Sarilamak Harau, Lima Puluh Kota. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71"LU- 3 0°22'14,52"LS Dan 100°15'44,10" BT- 100°50'47,80" BT dan berada di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki topografi bervariasi, mulai dari datar, lereng, bergelombang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 110-2.261 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

Daerah terendah (118 Mdpl) berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan daerah tertinggi (837 Mdpl) berada di Kecamatan Gunung Omeh. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) buah gunung, yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), dan Gunung Sanggul (1,495 m). Selain itu juga terdapat tujuh belas (17) buah sungai yang tersebar di beberapa kecamatan. Sungai terpanjang adalah Batang Sinamar (96,13 km) yang melintasi kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Lareh sago Halaban. Sedangkan sungai terpendek adalah Batang enan (5 km) di Kecamatan Bukit Barisan.

Bila ditinjau dari aspek penggunaan lahan maka sebagian besar wilayah kabupaten Lima Puluh Kota merupakan hutan yang luas 168,145 Ha atau 50,13%, yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 114,667 Ha, Hutan Suaka Alam dan Wisata seluas 20.673 Ha, serta Hutan Produksi seluas 32,805 Ha. Sedangkan penggunaan lahan lainnya diperuntukkan sebagai lahan basah yang digunakan untuk sawah beririgasi produktif seluas 14.090 Ha, sawah beririgasi tidak produktif seluas 6.641 Ha, sawah non irigasi seluas 1.555 Ha, daerah rawa seluas 171 Ha, kolam/tebat/ embun seluas 1.320 Ha, waduk/ danau seluas 1.814 Ha, lahan kering untuk perkebunan seluas 40.250 Ha, pemukiman/ perkarangan seluas 9.140 Ha, kawasan industriseluas 171 Ha, serta kawasan pertambangan seluas 395 Ha. Selain itu terdapat pula lahan terlantar/ semak/ belukar seluas 54.825 Ha, dan areal untuk penggunaan lainnya seluas 36.913 Ha.

Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa DPRD merupakan suatu instansi yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Struktur Organisasi**

Sekretaris Dewan	: Drs. Deddy Permana, M.M.
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	: Wahyu Marmora Samry,SH
Kasubag Persidangan dan Risalah	: Suheryanto S.Sos
Kasubag Kajian Perundang-undangan	: Yandri, S.H
Kasubag Humas dan Protokoler	: Nicel Riza Anggraini, SE
Kabag Umum dan Keuangan	: Khris Ladeva, S.STP
Kasubag Program dan Keuangan	: Husni S.Sos
Kasubag TU dan Kepegawaian	: Hendri Jasmar S.H
Kasubag Rumah Tangga	: Amirunnas, S.Sos
Kabag Fasilitas Penanganan dan Pengawasan	: Nur Akmal
Kasubag Fasilitas dan Pengawasan	: Fadly Sutrisno, SM
Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	: Adriwan Frima Putra S.Sos
Kasubag Fasilitas Penganggaran	: Khairispen Walidi, Amd

**4. Visi Misi**

**Visi**

Mewujudkan kabupaten limapuluh kota sejahtera dan dinamis "yang mantap" berlandaskan iman dan takwa.

**Misi**

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah,meningkat manajemen pengelolaan komoditas unggul dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian,perkebunan,peternakan,perikanan dan sda lainnya,dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan
- b. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui gerakan ekonomi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerakyatan, koperasi, umkm, gerakan usaha dini mandiri, serta gerakan pemberdayaan perempuan, gerakan sayang jumbo

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sdm
- d. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang di dukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemda berdasarkan prinsip<sup>2</sup> tata kelola pemerintah yang baik
- e. Jamin penjenjangan karir dan kesejahteraan pns dan perangkat nagari
- f. Peningkatan pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintah dan lembaga<sup>2</sup> nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lambung piti nagari sesuai karakteristik potensi lokal
- g. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.

**5. Anggota Dprd Dan Fraksi**

**Tabel 1 Daerah Pemilihan 1**

No	Nama	Partai	Fraksi
1	Beni Murdani	PKS	PKS
2	Ermizal	PPP	PPP
3	Irwin Idrus	Gerindra	Gerindra
4	Afri Yunaldi	Golkar	Golkar
5	Akmal Rustam	PDIP	PDIP
6	Alfian	Demokrat	Demokrat
7	Marsanova Andesra	PAN	PAN
8	Zuhatri	Hanura	Hanura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2 Daerah Pemilihan 2**

No	Nama	Partai	Fraksi
1	Gusti Randa	Hanura	Hanura
2	Syamsul Mikar	Golkar	Golkar
3	Irmantedi	Gerindra	Gerindra
4	Syamsuwirman	Demokrat	Demokrat

**Tabel 3 Daerah Pemilihan 3**

No	Nama	Partai	Fraksi
1	Sastri Andiko	Demokrat	Demokrat
2	Epi Suhardi	Hanura	Hanura
3	Virmadona	Gerindra	Gerindra
4	Wirman Dt Pangeran	PPP	PPP
5	Asrul	PKB	PKB
6	Mulyadi	PAN	PAN
7	Zukron	PKS	PKS
8	Riko Febrianto	Golkar	Golkar

**Tabel 4 Daerah Pemilihan 4**

No	Nama	Partai	Fraksi
1	Deni Asra	Gerindra	Gerindra
2	Yos Sariadi	PKS	PKS
3	Akrimal Adam	PAN	PAN
4	Marshal	Demokrat	Demokrat
5	Hemmy Setiawan	PKB	PKB
6	Alia Effendi	Nasdem	Nasdem
7	Afdal	Gerindra	Gerindra
8	Arsi Medes	Hanura	Hanura
9	Putra Satria Veri	Golkar	Golkar

**Tabel 5 daerah pemilihan 5**

No	Nama	Partai	Fraksi
1	Khairul Apit	Gerindra	Gerindra
2	Bisron Hadi	PKS	PKS
3	Wendi Chandra	Demokrat	Demokrat
4	Doni Iklas	Golkar	Golkar
5	Ridhawati	PPP	PPP

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas maka penelitian ini dapat di tarik kesimpulan:

1. Program anggota DPRD dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memanfaatkan kegiatan reses ini prosesnya akan memunculkan suatu kebijakan atau rancangan program daerah. Dari sekian banyak yang disampaikan masyarakat kepada anggota dewan pada saat kegiatan reses dimulai, anggota dewan sebisa mungkin menampung semua aspirasi masyarakat. Ada dua program anggota dewan disini yang pertama reses dan yang kedua jasmas (jaaringan aspirasi masyarakat). Kedua program tersebut berbeda cara nya meski sama-sama menyerap aspirasi masyarakat, dalam kegiatan reses dilakukan secara kelompok atau masa yang berarti ada forum antara masyarakat dengan anggota dewan, dalam kegiatan reses tersebut tersebut memunculkan suatu aspirasi masyarakat yang akan menjadi laporan dan menjadi skala prioritas bagi anggota dewan untuk menjadi acuan kebijakan dan akan direalisasikan. Anggota dewan memaksimalkan reses ini dapat dilakukan dengan baik apabila anggarannya juga sesuai. dalam program jasmas sendiri anggota dewan juga harus berusaha keras agar itu dapat direalisasikan. Komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen inilah yang sangat penting bagi pemerintah, agar mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang mungkin juga sulit di jamah oleh pemerintah pusat.
2. Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dapil III menjadikan kegiatan reses sebagai media komunikasi politik. Dalam penelitian ini melihat anggota DPRD dapil III Kabupaten Lima Puluh Kota dari masing-masing anggota DPRD memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan komunikasi dengan konstituennya. Dari Sastri Andiko Fraksi Demokrat yang lebih memilih konstituennya dari kalangan partai mana pun selain konstituen juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menilai bagaimana kinerja beliau juga agar t dapat mendengar keluhan dan membagi informasi tidak hanya menetap dengan konstituen yang sama, hal serupa dilakukan oleh anggota dewan dari Fraksi PKS yaitu Zukron, tetapi anggota dewan yang ini lebih memilih kepada konstituen yang memilihnya saja berbeda dengan Bapak Ikhnan, begitu Juga dengan Pak Asrul dari fraksi PKB yang background nya dulu seorang kepala desa sehingga sedikit banyak ia lebih sering mengadakan di kantor desa dengan konstituen yang mungkin kebanyakan juga sama orangnya dari sebelum-sebelumnya.

3. Media massa merupakan sasaran empuk bagi semua politikus untuk membangun sebuah personal branding tidak terlepas para politikus Di tengah godaan kepentingan kontestan pemilu, media massa ditantang untuk menjaga integritas profesionalismenya. Karena meski porsi berita mengenai pemilu yang disajikan media massa sangat banyak tapi belum berarti media massa telah ikut mensukseskan pemilu. Karena itu tema berita yang diangkat oleh media massa harus obyektif.

Para anggota DPRD banyak memanfaatkan platform sosial media seperti Facebook untuk menyampaikan kegiatan reses mereka dan juga membangun citra positif.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa saran berdasarkan pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini.

### 1. Bagi Anggota DPRD

Saran dari peneliti yang bisa diberikan untuk anggota DPRD berdasarkan pokok pikiran yang didapat selama penelitian adalah dengan meningkatkan lagi program Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) untuk menampung aspirasi dari para konstituen karena kegiatan ini tidak membutuhkan dana yang besar dibanding reses karena kegiatan ini bisa dilaksanakan kapanpun dan dengan jumlah konstituen yang tidak ditentukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bagi Pemerintah

Saran dari peneliti yang bisa diberikan untuk pemerintah berdasarkan pokok pikiran yang didapat selama penelitian adalah dengan lebih meningkatkan fasilitas untuk anggota DPRD dalam melakukan Reses terutama fasilitas anggaran dana pelaksanaan Reses, dengan meningkatkan anggaran dana reses diharapkan kemudian para konstituen akan lebih tertarik untuk menghadiri reses ini sendiri dan kemudian aspirasi yang didapat lebih banyak dan dapat membantu pembangunan berkelanjutan di kabupaten Lima Puluh Kota.

## 3. Bagi Masyarakat

Saran dari peneliti yang bisa diberikan untuk masyarakat berdasarkan pokok pikiran yang didapat selama penelitian adalah untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk menghadiri pelaksanaan Reses karena kegiatan ini adalah saat yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sebanyak-banyaknya dan anggota DPRD berlaku sebagai wadah aspirasi ini yang kemudian akan disampaikan pada rapat paripurna yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan daerah dan penggunaan anggaran kabupaten untuk pembangunan daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali. novel.1999.*Peradaban komunikasi politik*. Bandung: Remaja rosdakarya
- Alyusi, S. D. (2016). *Media Sosial: Interaksi, Identifikasi, dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Ardial.2010.*Komunikasi Politik*, Jakarta Barat; PT Indeks
- Arifin,Anwar.2015.*Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta:Rajawali Pers Budiarjo;
- Miriam.2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta;PT. Gramedia Pustaka
- Cangara, Hafied.2016.*Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Chaniago; A. Andrinof.2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta;Rajawali Pers
- Dunn; William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta;Gajah mada University Press
- E. Kristi; Purwandari.2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Manusia*, Jakarta; LPSP3
- Emzir.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Husaini; Usman.2003. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta; Bumi Aksara
- Junaedi,Fajar.2013. *Komunikasi Politik:Teori,Aplikasi,dan strategi di Indonesia*. Yogyakarta:Buku Litera Yogyakarta
- Kartini; Kartono.1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung; Mandar Maju
- Kencana,Inu syafie.2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta
- Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Moleong;Lexy. J.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Morissan. 2011 *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Mufti, Muslim. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Media
- Muhajir; Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Rake Sarasin, Nasution, 1996. *Metode Research*, Jakarta; PT. Bumi Aksara
- Nimmo; Dan. 2005. *Komunikasi Politik, komunikator, pesan, media*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Saeiful, Asep Muhtadi. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia, Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sudianto; 2016. *Komunikasi Politik, jakarta*; Raja Grafindo Persada
- Syaukani; Affan Gaffar, Ryias Rasyid. M, 2000. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar
- Uchyana, onong Effendy. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

### Jurnal dan skripsi

- Hanida P. Rozidetano, Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pilihannya, (Skripsi, Tidak Diterbitkan, FISIP, Universitas Andalas). Tersedia di ([repository.unand.ac.id](http://repository.unand.ac.id) > Rozodetano), (diunduh pada 25 desember 2021, pukul 08.58).
- Qory K. Putri, M. Y. Tiyas Tinov, “Efektifitas Reses Anggota DPRD Kab. Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupal, dan Kecamatan Rupal Utara)” *Jurnal Online Mahasiswa Vol 1, No. 1, (Februari 2014)*, hal 1. (Artikel Online), tersedia di: [jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2183](http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2183); diunduh pada 25 desember 2021 Pukul 20.15 WIB.
- Sofyan Arief, SH, “Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Kekuasaan Legislatif (Study Di DPRD Kota Malang)” *Jurnal Legality Vol 20 No.2*, hal 3, (Artikel Online), tersedia di: [ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/300/313](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/300/313); diunduh pada 25 desember 2021, Pukul 21.11 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

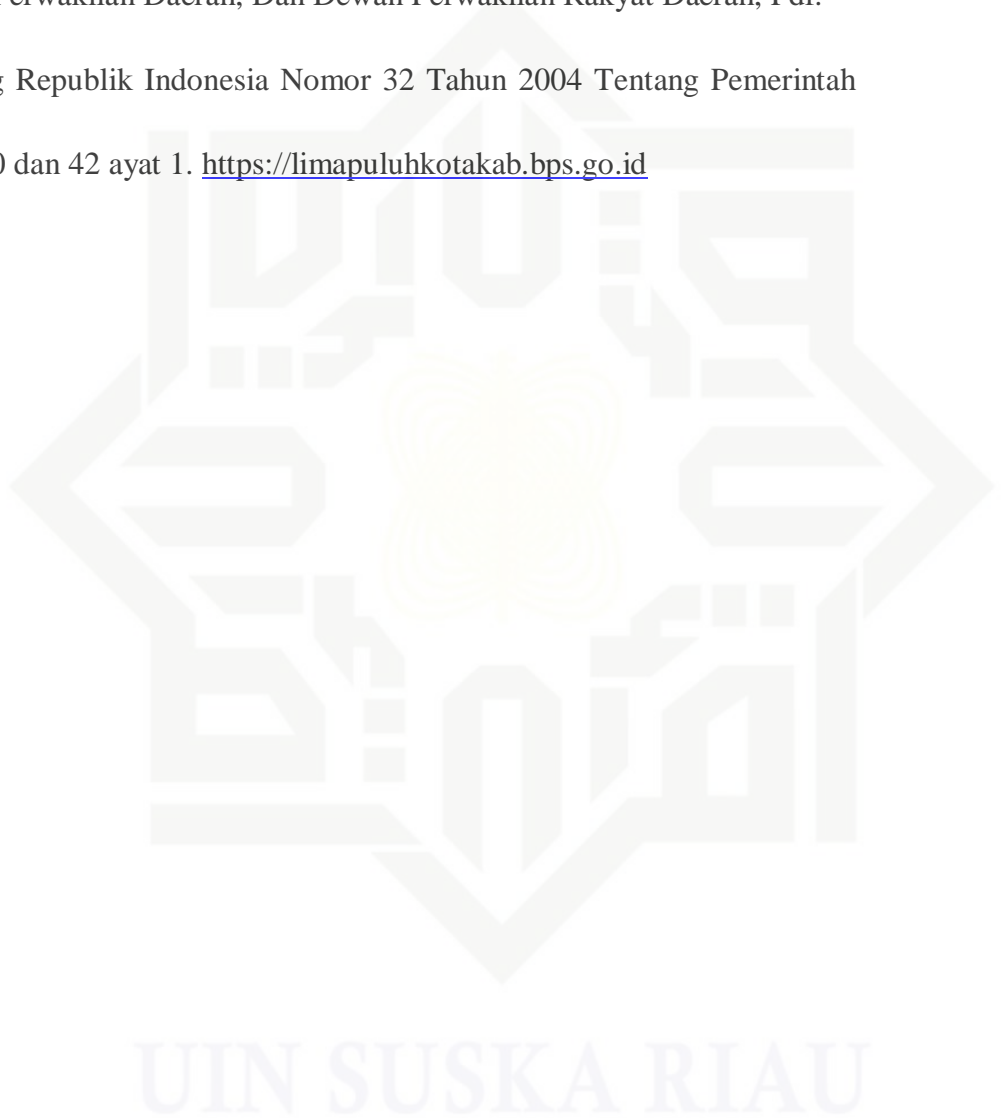
### Undang-undang dan internet

<https://limapuluhkotakab.bps.go.id/statictable/2015/03/27/3/batas-wilayah-dan-letak-geografis.html>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pdf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah Pasal 40 dan 42 ayat 1. <https://limapuluhkotakab.bps.go.id>



## Lampiran I

### Pedoman Wawancara

#### **STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM MELAKUKAN RESES DI DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

##### Pertanyaan untuk anggota Dewan

1. Bagaimana tingkat partisipasi konstituen ketika kegiatan reses berlangsung?
2. Bagaimana cara anggota dewan memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat dikegiatan reses?
3. Setelah melakukan kegiatan reses, langkah apa yang diambil anggota dewan terhadap semua aspirasi yang disampaikan oleh konstituen tersebut?
4. Bagaimana proses anggota dewan mewujudkan tuntutan masyarakat?
5. Dalam serap aspirasi dengan konstituen, apakah anggota dewan melakukan serap aspirasi hanya dikegiatan reses?
6. Apakah partisipasi konstituen dalam kegiatan reses ini orang-orang yang biasa diundang atau merata?
7. Selama ini program apa saja yang sudah terealisasi dari berbagai aspirasi masyarakat tersebut?
8. Apa kendalanya dalam melakukan kegiatan reses?
9. Bagaimana cara anggota dewan mengatasi kendala-kendala tersebut?

##### Pertanyaan untuk Konstituen

1. Apa yang saudara ketahui tentang reses?
2. Berapa kali saudara menghadiri reses anggota dewan?
3. Selama anda menghadiri kegiatan reses, apakah konstituen yang hadir ada perubahan atau tetap hanya orang-orang yang sama?
4. Apa yang anda dapatkan dalam setiap kegiatan reses?
5. Berapa anggota dewan yang pernah reses di daerah ini?
6. Apa perbedaan anggota dewan satu dengan yang lainnya pada saat kegiatan reses atau setelah kegiatan reses?
7. Apakah setiap anggota dewan yang melakukan komunikasi dengan konstituen sudah maksimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat?
8. Bagaimana kinerja anggota dewan dan apa hasil yang sudah dirasakan oleh konstituen dari pemerintah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran II

### Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak Zukron B.ac anggota DPRD dari Fraksi PKS pada rabu 9 maret 2022



Wawancara dengan bapak Sastri Andiko Anggota DPRD dari fraksi Demokrat pada rabu 9 maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Asrul anggota DPRD dari fraksi PKB pada rabu 9 maret 2022



Kegiatan reses dari anggota DPRD fraksi PKS bapak Zukron pada 15 desember 2022



Kegiatan reses dari anggota DPRD fraksi PKS bapak Zukron pada 15 desember 2022



Kegiatan reses dari anggota DPRD fraksi DEMOKRAT bapak Sastri Andiko pada 18 desember 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan reses dari anggota DPRD fraksi DEMOKRAT bapak Sastri Andiko pada 18 desember 2022

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.